

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang terbaik bagi daerahnya setempat. Keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pada kenyataannya di Indonesia, pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana bantuan pusat. Hal ini sering dijumpai bahwa dana bantuan pusat masih jauh lebih besar dari pendapatan asli daerah.

Mengingat adanya tuntutan dari masyarakat atas laporan pertanggungjawaban yang transparan, laporan keuangan pada lembaga pemerintahan daerah dianggap masih memiliki banyak keterbatasan penyajian yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial. Keraguan masyarakat ini dapat diatasi dengan adanya pengukuran kinerja. Kinerja disebut juga sebagai *performance* yang artinya adalah pencapaian suatu target (keberhasilan) dari sesuatu yang direncanakan dalam organisasi (Sumarjo,2010). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012) menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih rendah jika dilihat dari sisi rasio efektivitasnya. Sedangkan dalam penelitiannya, Sumarjo (2010)

mengatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih kurang efisien jika dilihat dari sisi rasio efisiensinya.

Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang. Pengukuran kinerja keuangan daerah adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik. Bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif.

Di Jawa Barat sendiri khususnya di Kota Bandung akan dibangun proyek monorel. Proyek Monorail Bandung Raya sepenuhnya dibiaya dan dilaksanakan oleh swasta. Dari Indonesia sendiri digagas PT Sarana Infrastruktur Indonesia dan PT Jasa sarana dinaungi PT Panghegar Group. Sedangkan Pihak swasta China yakni China National Machinery Import & Export Corporation (CMC). Pada dasarnya proyek monorel sendiri menelan biaya yang sangat besar dan dikhawatirkan akan berhenti ditengah jalan tetapi dari pihak pemerintah daerah Jawa Barat yakin proses pembangunan berjalan efektif walaupun memerlukan dana besar didalamnya.

Leverage atau hutang yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan memberikan dampak positif yang besar untuk kelangsungan kinerja keuangan atau kegiatan dari setiap pemerintah daerah, salah satunya proyek monorel ini sendiri. Akan tetapi semakin besar *leverage*

akan memberikan dampak negatif karena ketergantungan pada pemerintah pusat akan *leverage* itu sangat tinggi dan akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin buruk.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat merupakan salah satu BUMD yang memiliki kinerja buruk didalamnya salah satu permasalahannya yaitu tata kelola manajemen yang kurang tepat. Karena eksistensi BUMD adalah sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Keberadaan BUMD diyakini dapat memberikan *multiplier effect* yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat. Dengan adanya pendirian BUMD, hal itu akan membuka lapangan kerja baru, menggerakkan sektor-sektor ekonomi produktif, serta menjadi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu juga BUMD akan mendorong *down effect* ekonomi secara menyeluruh, maka secara langsung juga akan menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak dan retribusi.

Sementara itu enam dari tujuh BUMD yang dimiliki Jawa Barat selalu mendapatkan suntikan modal berupa penyertaan modal yang jumlahnya tidak sepadan dengan kontribusinya terhadap PAD Jawa Barat. Tidak ada keinginan dari eksekutif untuk mereformasi BUMD. Dengan alasan sebagai bagian dari pelayanan publik, pemerintah selalu menjustifikasi suntikan modal kepada BUMD. Bahkan DPRD seringkali kecolongan dengan adanya

suntikan dana yang diberikan bukan dalam bentuk penyertaan modal sebagaimana yang disepakati dalam APBD.

Dengan adanya BUMD dan menekan fungsi BUMD itu sendiri ketergantungan akan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat diperkecil. Dana perimbangan dapat dijadikan sebagai dana untuk kepentingan-kepentingan yang jauh lebih dibutuhkan contohnya seperti proyek monorel yang akan dilaksanakan Pemprov Jawa Barat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pengaruh *Leverage* dan *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam judul “Pengaruh *Leverage* dan *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” yaitu :

1. Adanya tuntutan dari masyarakat atas laporan pertanggungjawaban yang transparan, laporan keuangan pada lembaga pemerintahan daerah dianggap masih memiliki banyak keterbatasan penyajian yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial.

2. Enam dari tujuh BUMD yang dimiliki Jawa Barat selalu mendapatkan suntikan modal berupa penyertaan modal yang jumlahnya tidak sepadan dengan kontribusinya terhadap PAD Jawa Barat.
3. Ketergantungan pemerintah daerah akan dana perimbangan dari pemerintah pusat akan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

C. Pembatasan masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Peneliti menggunakan Kabupaten/Provinsi Jawa Barat sebagai data sekunder.
2. Periode pengamatan hanya 4 tahun yaitu tahun 2008-2012.
3. Variabel independen yang diuji yaitu mengenai pengaruh *leverage* dan *intergovernmental revenue* dengan variabel dependen kinerja keuangan pemerintah daerah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat?
2. Apakah *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat?

3. Apakah *leverage* dan *intergovernmental revenue* secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat?

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Pemerintah :
 - a. Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penerapan kebijakan keuangan daerah.
 - b. Sebagai pengaya ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan.
2. Bagi Peneliti :
 - a. Peneliti memperoleh tambahan wawasan, pengalaman, dan pengetahuan khususnya mengenai keuangan pemerintah daerah
 - b. Salah satu pedoman bagi peneliti dalam melakukan penelitian serupa dikemudian hari
3. Bagi Mahasiswa lainnya :
 - a. Referensi dalam mempelajari bidang pemerintahan terutama topik tentang kinerja keuangan pemerintah daerah
 - b. Salah satu landasan dalam melakukan penelitian serupa